BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya terletak di jalan Manonjaya No. 50 Cibeureum Tasikmalaya. KPNN Tasikmalaya adalah sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan yang berada dalam lingkup Kantor Wilayan Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Sejarah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya tidak terlepas dari sejarah terbentuknya Kementrian Keuangan yaitu berdasarkan SK Menteri Keuangan No.0039 tanggal 29 September 1947 dibentuk Kantor Keuangan yang mengurus Keuangan Daerah yang kemudian dikonsolidasikan pada Organisasi Departemen Keuangan berdasarkan peraturan pemerintah No.15/1948 dengan susunan organisasi :

1. Jawatan Perbendaharaan Negara
2. Kantor Pusat Kementrian
3. Jawatan Daerah dan Cukai

Pada perkembangan selanjutnya,yaitu dengan SK Menteri Keuangan Tanggal 23 Maret 1955 No.60328/K terjadi penggabungan urusan Bendahara Negara dengan Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negara. Dengan adanya penggabungan tersebut, sampai dengan akhir tahun 1955 terdapat 16 kantor pusat Perbendaharaan Negara, 12 Kantor Pengawasan Negara, 1 Kantor Kas Negara

pembantu dan 718 Kantor Kas Pembantu. Pada tahun 1962 berdasarkan SK Menteri Keuangan tanggal 24 Agustus 1962 No.LAMP/Keu/06/62 Jawaban Perbendaharaan dan Kas Negara mengalami perubahan menjadi Kantor Perbendaharaan Negara sedangkan Kantor Pengawasan Negara diintegrasikan ke dalam Kantor Kas Negara.

Seiring dengan perkembangan dan penyederhanaan organisasi khususnya organisasi Kantor Pusat Direktorat Jendral Anggaran, maka berdasarkan SK Menteri Keuangan tanggal 12 Juni 1989 No.645/KMK.01/1989, Kantor Perbendaharaan dan Kantor Kas Negara (KPKN). KPKN ini melaksanakan fungsi ordonateur dan komptabel dalam satu atap. Selanjutnya, pada tahun 2005 KPKN mengalami perubahan nama menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No.214/KMK.01/2005 yang kemudian di perbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 dan peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang di perbaharui dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor:169/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Jenderal Perbendaharaan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya pada awal pembentukannya diresmikan oleh Bapak Jusuf Ramli selaku Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan pada tanggal 1 Juli 1976. Sejak awal berdirinya tahun 1976, KPPN Tasikmalaya telah mengalami beberapa pergantian pinpinan

Kantor. Pergantian ini seiring dengan kebijakan mutasi di lingkungan Departemen Keuangan,sebagaimana Tertuang pada Surat Keputusan Menteri Keuangan.

Adapun nama-nama kepala kantor yang telah ataupun sedang menjabat di KPPN Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Nama dan Periode Jabatan Kepala KPPN Tasikmalaya

No.	Nama	NIP	Periode Jabatan
1	Drs .Y.Merukh	060009332	1975 s.d 1978
2	Tjetjep Kusmana, Bc. Kn	060003767	1978 s.d 1982
3	Drs.Gindo R Marpaung	060022187	1982 s.d 1986
4	Drs. M.Ali Tojib	060016766	1986 s.d 1989
5	Drs. Bahransyah usman	060041929	1989 s.d 1992
6	Soetarno, SH	060033134	1992 s.d 1994
7	Mustopa Kamil, SH	060049654	1994 s.d 1997
8	M.Abidin May, SE	060050937	1997 s.d 1998
9	Drs. Walujo Djatiwijono	060035902	1998 s.d 1999
10	Drs.Muchdor	060035912	1999 s.d 2001

11	Dra. Ida Palembina LT, MM	060070331	2001 s.d 2004
12	Dra. Sujatmi	060045186	2004 s.d 2007
13	Supomo, SH	060042428	2007 s.d 2009
14	Agus Achmadi	060043569	2009 s.d 2010
15	Drs. Wawan Setiawan	195604111978091001	2010 s.d 2012
16	Haris Budi Susila	197208021993031003	2012 s.d 2015
17	Dedy Sumantri	196406231986031002	2015 s.d Sekarang

2.1.1 Kondisi Geografis Perusahaan

Secara geografis KPPN Tasikmalaya terletak di Jalan Manonjaya No.50 Kecamatan Cibeureum sekitar 60 kilometer kearah timur pusat Kota Tasikmalaya, daerah yang merupakan zona pemukiman dan pertanian ini cocok sekali untuk suasana kantor yang tenang dan nyaman dari hingar bingar Perkotaan dan Polusi. Posisi Kota Tasikmalaya yang strategis pada 108° 08' 38" - 108° 24' 02" BT dan 7° 10' - 7° 26' 32" LS di bagian Tenggara Wilayah Provinsi Jawa Barat, menjadikan Kota Tasikmalaya merupakan salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Jawa Barat – Priangan Timur. Dengan status sebagai PKW, maka Kota Tasikmalaya menjadi pusat pertumbuhan di wilayah Priangan Timur.

2.1.2 Visi dan Misi KPPN Tasikmalaya

2.1.2.1 Visi

Memberikan pelayanan prima dibidang perbendaharaan dank as Negara yang transparan dan akuntabel dengan system informasi keuangan yang cepat,tepat dan akurat.

2.1.2.2 Misi

Adapun misi yang dijalankan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yaitu "Menjadi pengelola perbendaharaan dan kas Negara yang professional berdediksi tinggi dan terpercaya".

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.169/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN adalah instansi vertical Direktorat Jendral Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kantor wilayah. Sebagai KPPN dengan Type A1. , KPPN Tasikmalaya mempunyai struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Umum

3. Seksi Pencairan Dana
4. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI)
5. Seksi Bank
6. Seksi Verifikasi Akuntansi

2.3 Uraian Tugas Perusahaan

1. **Kepala Kantor**

   Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan kegiatan kantor yang sedang berjalan di KPPN Tasikmalaya.

2. **Sub Bagian Umum**

   Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan organisasi, kinerja, SDM, dan keuangan, penatausahaan *user* SPAN, penyusunan bahan masukan dan konsep renstra ,Renja, RKT, PK, LAKIP KPPN, Tata usaha, rumah tangga dan kehumasan.

3. **Seksi Pencairan Dana**

   Seksi pencairan dana mempunyai tugas melakukan pengujian resume tagihan dan SPM, penerbitan SPPT, penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU, penerbitan Surat Pengesahan atas Ralat SPM dari satuan kerja dan Nota Dinas Kesalahan dan Perbaikan SP2D Hasil Verifikasi pada KPPN, dan pengelolaan data Kontrak,data supplier, belanja pegawai satker, dan monitoring evaluasi penyerapan anggaran satker, Serta melakukan pembinaan teknis pengelolaan perbendaharaan, fungsi *costumer service, supervisi* teknis SPAN dan *helpdesk* SAKTI.

4. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI)

Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimingan teknis pengolahan perbendaharaan, fungsi *customer service, supervise* teknis SPAN dan helpdesk, pemantauan standar kualitas layanan KPPN dan penyediaan layanan perbendaharaan, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasl pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Unsur-unsur tugas Kepatuhan Internal tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dalam rangka menyempurnakan kebijakan proses bisnis dan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Perbendaharaan dapat digambarkan dalam table dibawah ini :

5. Seksi Bank

Seksi Bank mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana, fungsi *cash management*, penerbitan daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pengelolaan rekening Kuasa BUN dan penetausahaan penerimaan Negara.

6. Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Seksi Verifikasi Akuntansi mempunyai tugas melakukan verifikasi pembayaran, rekonsiliasi laporan akuntansi, penyusunan laporan keuangan tingkat BUN, realisasi dan analisis kinerja anggaran, analisis data statistic laporan keuangan, pemantauan pengendalian intern.

2.4 Kegiatan Perusahaan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tasikmalaya (KPPN) adalah intansi vertical Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang organisasi dan Tata kerja instansi VertikalDirektorat Jenderal Perbendaharaan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tasikmalaya mempunyai tugas :

1. Melaksanakan sebagai kewenangan dan kuasa bendahara umum dalam lingkup kerja meliputi dua kota (Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar) dan tiga kabupaten (Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran);
2. Menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran dalam wilayah kerja KPPN Tasikmalaya;
3. Melakukan Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku dalam wilayah kerja KPPN Tasikmalaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tasikmalaya menyelenggarakan fungsi;

1. Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penerbitan surat perintah pencairan dana dari kas Negara atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara);
3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
4. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan
5. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
6. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara;
7. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;
8. Penatausahaan PNBP;
9. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
10. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
11. Pelaksanaan kehumasan.